



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS SOSIAL TAHUN 2025



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#DINSOS
Hadir

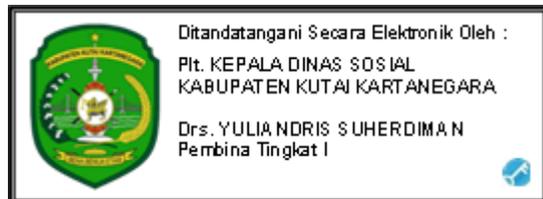
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rencana Kerja PD Dinas Sosial tahun 2025** dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu lima tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENCANA KERJA PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 14 Agustus 2024



Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	56
BAB V PENUTUP	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten KutaiKartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2025 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rencana Kerja OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangandibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
22. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
23. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
24. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
25. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) ;
26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial LanjutUsia ;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
40. Permendagri No m o r 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD setra tata cara perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD;
41. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1.3 Maksud dan Tujuan

4

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 adalah :

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam Rencana Strategis sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegaradisusun dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan BAB
- III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 4.1 Program dan Kegiatan
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2023 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu SKPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2023 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk perubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk bidang sosial terdapat 6 program yang meliputi : Program Pemberdayaan Sosial; Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana serta Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

7

a. Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS

Program ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pelayanan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial yang dapat diuraikan berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :

1. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti.**
Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Pada tahun 2023 dari target sebanyak 2.932 orang sudah terlayani sebanyak 2.932 orang atau 100 %. Adapaun sumber pembiayaan untuk pelayanan berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI, Program Bantuan Sosial Terencana Provinsi Kaltim dan Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti.**
Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti. Pada tahun 2023 dari target pelayanan sebanyak 347 anak terlayani sebanyak 347 anak atau 100 % yang terlayani melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI dan Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti.**
Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti. Pada tahun 2023 jumlah lanjut usia terlantar yang harus dilayani sebanyak 11.909 orang dan yang terlayani sebanyak 11.909 orang atau 100 %, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI, Program atensi Kementerian Sosial RI, Bansos Terencana Provinsi Kaltim layanan rujukan BPJS dan Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti.**
Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti. Pada tahun 2023 tidak terdapat orang yang harus dilayani.

b. Program Pemberdayaan Sosial

- 1) **Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)**
Sasaran kegiatan ini adalah lembaga kesejahteraan sosial atau sarana sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Pekerjaan yang dilakukan berupa pembinaan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial melalui sistem panti. Sasarannya adalah 18 lembaga kesejahteraan sosial yang telah terdaftar dan target hingga akhir tahun ini adalah sosialisasi terhadap seluruh LKSA yang ada di wilayah Kabupaten Kukar agar segera memenuhi persyaratan resmi yang telah ditetapkan dan kedepannya dinas sosial memberikan bimbingan terkait pemenuhan akreditasi LKSA tersebut.

c. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- 1) **Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**

Kegiatan ini merupakan program pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dalam rangka untuk membantu masyarakat miskin dimaksudkan sebagai upaya percepatan dalam memutus mata rantai kemiskinan yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara. pemerintah daerah menyediakan bantuan kepada kelompok penerima manfaat yang terdiri dari disabilitas terlantar, anak terlantar serta lanjut usia terlantar yang belum mendapatkan program bantuan sosial baik dari Pusat maupun Provinsi. Selanjutnya menyediakan honorarium dan biaya operasional petugas pendamping dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi untuk menunjang operasional kegiatan dan bantuan biaya lain yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Bantuan biaya ini diberikan untuk kebutuhan selama 12 bulan.

- 2) **Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial**

Kegiatan ini bertujuan memberikan ketrampilan dan pemahaman dalam pengelolaan Data Kemiskinan bagi Puskesmas Desa maupun Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Kukar. Puskesmas diharapkan akan menjadi perpanjangan tangan Dinas Sosial di Desa dan Kelurahan dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan sosial yang mungkin muncul ditengah masyarakat. Puskesmas juga akan dibekali kemampuan mengaplikasikan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang menjadi alat pendataan bagi warga miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra_PD;

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial disusun sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam langkah kerja operasional berupa program-program pelayanan maupun program penunjang pelayanan kepada kelompok sasaran. Dalam menentukan program pelayanan setidaknya ada 2 (dua) instrumen yang harus dipedomani yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Setiap program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai indikator program. Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja manfaat (*outcome*) sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan indikator kinerja keluaran (*output*). Indikator *outcome* bisa diperoleh jika indikator *output* dari masing-masing kegiatan dapat berfungsi. Sedangkan indikator *output* merupakan indikator yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Diantara indikator *output*, *outcome* dan indikator kinerja sasaran memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja_PD Tahun 2024 hingga semester pertama secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
					Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	83,48	79	92,45	117,03	81	85,00	110,06
1 06 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian	40	16	6	6	100,00	6	28	70,00
1 06 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	120	60	12	12	100,00	12	84	70,00
1 06 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	18	4	5	5	100,00	4	13	72,22
1 06 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	20	10	2	2	100,00	2	14	70,00
1 06 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	44	16	8	8	100,00	8	32	72,73
1 06 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	25	25	20	80,00	30	75	75,00
1 06 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
1 06 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
					Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	94	86,97	84	93,3	111,07	90	90	95,74
1	06 02 2,02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	250	100	50	50	100,00	50	200	80,00
1	06 02 2,03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88	86,97	84	93,3	111,07	90	90	102,27
1	06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06 03 2,01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD				
					Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	97,63	100	100	100,00	100	100,00		
1	06	04	2,01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	7650	4100	2482	2482	100,00	1468	8050	105,23
1	06	04	2,02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	1575	368	670	670	100,00	695	1733	110,03

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar : 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD		
					Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	89,59	100	89,59	89,59	100	93,06	93,06
1	06 05	2,01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar	25	7	25	25	100,00	25	100,00
1	06 05	2,02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100,00	100	100,00
1	06 06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100,00	100	100,00
1	06 06	2,01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100	100	100	100	100,00	100	100,00
1	06 06	2,02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	20	4	4	4	100,00	4	20,00
1	06 07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	100	100	100	100	100,00	100	100,00
1	06 07	2,01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	100	100	100	100,00	100	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Sosial.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatarbelakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD					REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP	78,00	79,00	81,00	82,00	84,00	83,48	92,45	81,00	82,00	
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	SPM	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,63	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	SPM	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari ketersediaan sarana sosial, persentasi PMKS yang ditangani dan diberikan bantuan sosial.

Indikator persentasi penanganan PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Angka ini dihitung dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ditangani, baik melalui pola bimbingan sosial dan pemberian bantuan sosial. Pada tahun 2022 sejumlah 97,04 % PMKS menerima pelayanan, angka ini meningkat menjadi 98,72 % pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil dilayani oleh Dinas Sosial dengan signifikan. Untuk target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebesar 100% dengan kelompok layanan bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis serta Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial telah tercapai 100 %.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan melalui identifikasi permasalahan tabel sebagai berikut :

Tabel
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Aspek Kajian	Permasalahan
Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersedia aturan hukum lokal yang mengatur kriteria kemiskinan yang berbasis pada kearifan local. b. Kurangnya tenaga terampil aparatur di Desa dan Kelurahan dalam proses pemutakhiran Data. c. Masih tingginya subyektifitas petugas pengolah data di kelurahan maupun desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data. d. Tingka akurasi data yang masihrendah. e. Akses internet yang belum tersedia baik di beberapa wilayah.
Bantuan stimulan bagi fakir miskin dan pendampingnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana bantuan stimulant dan pendampingnya bagi fakir miskin belum tersediaanggarnya. b. Belum tersedia tenaga fungsional pendamping sosial.
Sarana dan prasarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana prasarana panti sosial kurang memadai b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan standar pelayanan panti c. Belum tersedia panti rehabilitasi bagi ABH d. Belum tersedia pekerja sosialfungsional

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuantitas dan kualitas TAGANA masih kurang b. Kendaraan lapangan untuk penanganan bencana dalam kondisi rusak.
Aspek Kajian	Permasalahan
Pelayanan sosial anak terlantar diluar panti	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya tenaga pendamping sosial untuk pelayanan diluar panti b. Sarana prasarana penunjang pelayanan belum tersedia
Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan trauma	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya instruktur vokasional bagi penyandang cacat dan trauma b. belum adanya perda yang mengatur tentang pelayanan sosial bagi penyandang cacat c. sarana prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat masih terbatas
Pelayanan kesejahteraan sosial melalui UPT	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan sarana prasarana sehingga daya tampung sangat terbatas b. Kurangnya petugas yang memiliki bekal ketrampilan teknis pelayanan kesejahteraan anak melalui panti c. Kurangnya pengetahuan petugas tentang standar pelayanan lembaga kesejahteraan sosial
PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis PSKS yang ada sangat terbatas b. Kurang intensifnya pembinaan terhadap TKSM

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling memiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perlunya Updating data pemerlu pelayanan terutama Basis Data Terpadu yang saat ini dijadikan acuan mutlak dalam melaksanakan pelayanan.
2. kurangnya kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial
3. kurang memadainya sarana prasarana penunjang pelayanan
4. kurang tersedianya regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman secara teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih merupakan pedoman sekaligus sasaran yang ingin dituju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum program yang ditujukan untuk mencapai misi dilaksanakan, dilakukan analisis terhadap permasalahan dan factor-faktor yang mungkin dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan program tersebut. Telaah terhadap kemungkinan adanya faktor penghambat ataupun pendukung pelaksanaan program ditampilkan dalam tabel berikut ini;

Tabel ;
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya			
	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Akurasi Basis Data Terpadu yang masih rendah Karen proses verivali sedang berjalan	Luas wilayah, banyaknya data yang harus diverivali,jaringan internet, SDM verivali data	Adanya dukungan program dari Kemensos dan dukungan KDH dalam proses verivali data.
		Minimnya program komplementaritas bagi penerima manfaat Program Pusat	Transisi menuju bantuan non tunai sering terkendala system perbankan	Pendampingan mulai intensif dilaksanakan dan sekaligus dalam rangka mensosialisasikan rencana pemenuhan program komplementaritas
	Program : Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Belum tersedianya panti panti rehabilitasi PMKS	Kuota Panti milik Provinsi terbatas	Upaya dilakukan melalui rehabilitasi berbasis masyarakat
	Program: Pemberdayaan Sosial	Belum optimalnya proses pemberdayaan PSKS	Kekosongan Pejabat pemangku	Adanya pendamping program yang diluncurkan kementerian Sosial RI
		Perubahan SPM	Tanggung jawab pengelolaan panti ada pada pemerintah provinsi	Dalam masa transisi kabupaten masih diperkenankan melakukan pelayanan

Memperhatikan beberapa program yang disajikan untuk mencapai misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu dilakukan beberapa penajaman terhadap indikator kinerja (outcome) dan program yang disajikan. Selain melakukan penajaman terhadap indikator kinerja dan mempertimbangkan ulang untuk menghapus nama beberapa program, dipandang perlu juga untuk Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Kementerian Sosial RI agar terjadi pula keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah. program baru didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024. Adapun program yang dipandang penting dalam upaya menyelaraskan dengan Rencana Kerja Daerah adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Mengacu pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi PMKS yang termasuk dalam katagori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan pendekatan persuasive, motovatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. SPM mengatur kewajiban pemerintah daerah kabupaten/ kota melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar luar panti bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis terlantar.

2. Program Perlindungan dan jaminan sosial.

Program ini menitik beratkan sasarannya pada peningkatan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif, indikator sasaran program ini diantaranya adalah presentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandirianya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar dan presentase korban bencana dan kelompok rentan.

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini penting untuk untuk dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam upaya penanggulangan

Kemiskinan Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini mencoba memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan arah dan Kebijakan Kemntrian Sosial Republik Indonesia. Sasaran program ini adalah Lembaga Swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanganan masalah sosial baik organisasi maupun perorangan.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah sosial yang sifatnya sangat dinamis. Perkembangan masalah sosial terjadi seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat. Tantangan utama yang akan dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan pelayanan adalah kaderisasi sumberdaya manusia. Mulai tahun 2021 sampai tahun 2026 akan banyak pegawai Dinas Sosial yang memasuki usia pensiun. Mereka terdiri dari pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dan pegawai yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sejak awal bertugas sebagai pegawai.

Tantangan yang dihadapi ini disisi lain merupakan peluang bagi Dinas Sosial untuk mengembangkan pelayanan. Pensiunnya pegawai senior ini memberikan peluang bagi pegawai yang ada untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional. Peluang lain yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan ini tentunya dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan

kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut sebagian merupakan tugas fungsi Dinas Sosial.

5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok. Kelompok permasalahan ini merupakan masalah strategis yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa isu strategis tersebut meliputi :

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Bupati Kutai Kartanegara, ditetapkan melalui serangkaian kebijakan dan program. Strategi ini sejalan dengan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi KUKAR IDAMAN. Adapun kebijakan dan program tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan : Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas berikut ini :

a. Program Pembinaan Anak Terlantar

Anak adalah generasi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya permasalahan pada anak dapat berdampak pada masa depan anak yang juga masa depan bangsa. Pembinaan terhadap anak terlantar dilakukan agar anak dapat menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, sehingga menjadi manusia dewasa yang sejahtera. Pembinaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dan mempersiapkan anak memasuki masa dewasa.

b. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

c. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

2. Kebijakan : Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan,

keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas :

a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Didalam masyarakat sudah terdapat upaya-upaya yang melembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya ini ada yang dilaksanakan dalam lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas manajemen pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan

c. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial

d. Program Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2025 serta prospek tahun 2025 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di tetapkan sebagai berikut :

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	50.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	8 Laporan	150.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	9.332.385.997		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	11.708.906.176	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	9.192.385.997	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1106 Orang/Bulan	11.293.906.176	P1 = Wajib dan Mengikat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	250.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	140.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	140.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 Laporan	52.800.000		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	4 Laporan	205.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						25.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	52.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	30.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	40.000.000		Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	40.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	40.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	40.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	254.341.800		Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	394.341.800	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.110.200	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.110.200	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	59.247.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	59.247.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	30.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	19.986.600	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.986.600	
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	29.998.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	29.998.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Orang	60.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	34.222.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	34.222.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41 Unit	0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen	700.000.000		Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen	6.170.000.000	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	50 Orang	75.000.000		Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	50 Orang	75.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	75.000.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang dikembangkan	100 Persen	625.000.000		Persentase PSKS yang dikembangkan	100 Persen	6.095.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	400.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	400.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Lembaga	5.245.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen	50.000.000		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen	50.000.000	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100 Persen	50.000.000		Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100 Persen	50.000.000	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen	1.990.000.000		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen	5.508.500.000	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	1.300.000.000		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	4.818.500.000	
Penyediaan Permakanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	820 Orang	3.508.500.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	525.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	310.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	595 Orang	690.000.000		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban	595 Orang	690.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Permakanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	200 Orang	200.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	80.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	80.000.000	
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	60.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60.000.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen 85 Persen	9.373.600.000		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang	100 Persen 85 Persen	7.033.800.000	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	300.000.000		Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	1.000.000.000	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	1.000.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penganggulangan Kemiskinan

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100 Persen	9.073.600.000		Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100 Persen	6.033.800.000	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2 Dokumen	380.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	175209 Orang	380.000.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	65403 Keluarga	500.000.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	7.943.600.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	4.903.800.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan ; KP_Stunting
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 KK	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	250.000.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan ; KP_Stunting
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	625.000.000		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	2.475.000.000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen	425.000.000		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen	1.250.000.000	
Penyediaan Makanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	600.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	1500 Orang	300.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						Jumlah Penerima Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan dalam masa tanggap darurat bencana	100 Orang	200.000.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial						Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pasca masa tanggap darurat bencana	50 Orang	150.000.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	200.000.000		Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	12 Desa	1.225.000.000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Desa	100.000.000	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Desa	750.000.000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	25 Orang	475.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang dikelola	100 Persen	200.000.000		Persentase TMP yang dikelola	100 Persen	1.900.000.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 Persen	200.000.000		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 Persen	1.900.000.000	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	2 Dokumen	1.500.000.000	Mandatory Spending Infra Struktur
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	100.000.000	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan	2 Makam	400.000.000	
TOTAL					23.762.076.495			40.454.496.674	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 meliputi 7 (Tujuh) program yang dilaksanakan dalam 18 (Delapan Belas) kegiatan, dan 61 (Enam Puluh Satu) sub kegiatan. Adapun target sasaran dan target output yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Data	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	3 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Laporan	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1106 orang/ Bulan	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	4 Laporan	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	170 Paket	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Paket	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Paket	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	

3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	10 Paket	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Melayu	4 Paket	
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	200 Laporan	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	200 Dokumen	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	5 Paket	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	10 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	33 Unit	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Unit	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Unit	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Unit	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	41 Unit	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240 Lembaga	
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Sertifikat	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Kewenangan Kabupaten/Kota			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	820 Orang	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Orang	
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
6	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	100 Orang	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	
2	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	
3	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	
4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175209 Orang	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65403 KK	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 KK	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penerima Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan dalam masa tanggap darurat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pasca masa tanggap darurat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja, Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Muara Kaman, Sebulu	12 Desa/ Kelurahan	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Makam	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			

Berdasarkan proses perencanaan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa usulan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran pihak legislatif yang terkait dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan bidang sosial yang telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk tahun anggaran 2025 yaitu :

Tabel T-C.32.							
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025							
Kabupaten Kutai Kartanegara							
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial							
No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,)	Pengadaan Alat Pertukangan Gergaji Listrik Karang taruna Kel. Panji 1 unit	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Stadion Timur II Kel.Panji, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Peralatan Tukang Gergaji Listrik	1 Unit	Belum dilengkapi proposal
2	Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,)	Pengadaan Alat Pertukangan Karang taruna Kel. Panji	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Stadion Timur II Kel.Panji, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Peralatan Tukang	1 Paket	Belum dilengkapi proposal
3	Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,)	Anggota Karang Taruna Sangaji kel. Baru Belum Memiliki Pakaian untuk kegiatan di lapangan (PENGADAAN PAKAIAN KAOS KARANG TARUNA SANGAJI KEL. BARU)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Aji Imbut RT.01 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Pakaian Karang Taruna	1 Paket	Belum dilengkapi proposal
4	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kurangnya pemahaman pengelolaan pariwisata	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl.Habib Tunggang Parangan RT 004 , Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah	Jumlah Anggota Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan pengelolaan objek wisata	-	Belum dilengkapi proposal
5	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mata pencaharian Penurus Karang Taruna dan Anggota, di Desa belum optimalnya peranan karang tarun dan kelompok lainnya di desa, pendampingan, penyuluhan , di desa sarana dan prasaran, minim pengetahuan masyarakat tentang PSKS, keterbatasan Informasi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dusun Mekar Sari Dan Dusun Mekar Baru, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Kupang Baru	Jumlah Anggota Karang Taruna yang mendapatkan sosialisasi peran dan fungsi karang taruna	-	Belum dilengkapi proposal
6	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pengadaan Bantuan Karang Taruna berupa : Pakaian seragam Karang Taruna, Bantuan Barang untuk Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna, Pengadaan Sarana Prasarana Panti Asuhan berupa Meubelair, Peralatan Tidur, ATK (komputer dll), Pengadaan Sarana pendukung Taruna Siaga Bencana berupa alat pemadam ringan, pakaian seragam, Alat Komunikasi (HT), Pakaian Seragam Pekerja Sosial Masyarakat	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Kota Bangun I, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun I	Jumlah Sarana dan Prasarana Karang Taruna	-	Belum dilengkapi proposal
7	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pengadaan seragam lapangan untuk Karang Taruna	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Salo Palai RT 02, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Salo Palai	Pakaian Seragam Karang Taruna	-	Belum dilengkapi proposal
8	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Perlu adanya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Loa Duri Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	Pakaian Seragam Karang Taruna	-	Belum dilengkapi proposal
9	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Permohonan Bantuan Tandon Air 1.200 Liter Desa Liang Ulu	Tidak Ada Sub Kegiatan pada Dinas Sosial yang relevan terhadap permohonan	Desa Liang Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang Ulu			Tidak Ada Sub Kegiatan pada Dinas Sosial yang relevan terhadap permohonan
10	Fasilitasi sarana prasarana desa	Di Desa Muara Muntai Ulu masih banyak terdapat rumah yang tidak layak huni	Tidak Ada Sub Kegiatan pada Dinas Sosial yang relevan terhadap permohonan	RT. 001 s.d. RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu			Tidak Ada Sub Kegiatan pada Dinas Sosial yang relevan terhadap permohonan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Salah satu lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen dari target nasional pada tahun 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Sumber data yang akan dijadikan basis data belum tersedia dengan mudah dan cepat2. Koordinasi dengan instansi penyedia data belum berjalan dengan baik, karena adanya pembatasan kewenangan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum terintegrasinya aplikasi pengolah dan penyedia data PMKS dengan basis data kemiskinan2. Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan basis data kemiskinan dan PMKS	Memberikan peluang kerjasama dengan instansi penyedia data untuk meningkatkan kualitas basis data dalam mendukung pencapaian sasaran
2	Pengembangan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan kesejahteraan sosial(LKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pendamping dan pembimbing LKS2. Kerjasama dengan BBPPKS dalam pengembangan kapasitas SDM belum berjalan dengan baik		Menjadi faktor pemicu dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinsos Prov Kalimantan Timur Tahun 2019-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dimensi kualitas hidup yang sangat luas sehingga perlu diturunkan secara lebih khusus untuk memudahkan penanganan	Tidak adanya informasi yang tegas tentang berapa kontribusi yang diharapkan dari Kabupaten/Kota untuk mencapai target sasaran tersebut	
2	Meningkatkan potensi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Upaya peningkatan potensi sosial PMKS masih dipahami dengan sangat sederhana dan terbatas	PMKS sangat mengharapkan upaya pemberdayaan yang bersifat instan, bukan pemberdayaan yang sebenarnya merupakan proses yang cenderung Panjang	Kebijakan Kepala Daerah untuk pemberdayaan masyarakat sangat tinggi
3	Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PSKS terutama TKSM yang jumlahnya paling banyak, kondisinya banyak yang sdh tidak aktif lagi 2. TKSM yang ada sudah banyak yang memasuki usia lanjut 3. PSKS yang masih potensial jumlahnya sangat terbatas dan sebarannya cukup jauh 	Pola pembinaan dan pemberian wewenang yang kurang jelas terutama bagi TKSM	Adanya kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, memerlukan partisipasi aktif dari PSKS

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur 2. Banyaknya aturan penyelenggaraa n pemerintahan yang seringkali membingungka n dalam pelaksanaanny a 3. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempata nSDM Aparatur yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang 2. Tidak tersedianya petunjuk tehnis operasional yang jelas dan mudah dioperasikan 	<p>Kebijakan Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dengan memberikan reward and punishment yang jelas</p>

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:
 - a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
 - c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
 - d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
 - e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
 - f) *continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai

secara bertahap

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam tabel berikut ini :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2021 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRAPD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRAPD
					2021 (target)	2021 (realisasi)	2022	2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar		Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	94,33%	94,23%	97,63%	95,50%	96,66%	97,83%	99,00%	99,00%
		Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	94,33%	94,23%	97,63%	95,50%	96,66%	97,83%	99,00%	99,00%
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai	74,76	83,48	83,50	83,50	83,75	83,85	84,00	84,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Dinas Sosial diantaranya :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

Selanjutnya dari 23 Program Dedikasi KUKAR IDAMAN terdapat 1 Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN yang merupakan bagian dari peran tugas dan fungsi Dinas Sosial untuk dapat mewujudkan program dimaksud.

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Dinas Sosial memberikan kontribusi dalam penanganan dan upaya penanggulangan kemiskinan. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang disasarkan kepada kelompok marginal. Dalam hal penanganan kemiskinan, masyarakat Kutai Kartanegara yang masuk didalam Basis Data Terpadu Kemiskinan memperoleh bantuan Sosial juga dari Kementerian Sosial RI melalui Program PKH dan BPNT dimana Kabupaten memiliki kewajiban mendukung kegiatan pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut.

3. Pengentasan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada Dinas Sosial saja Karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. Dinas Sosial berfungsi lebih kepada upaya pemenuhan Jaminan Hidup dan fasilitasi terhadap aksesibilitas warga miskin dalam memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu kolaborasi antar seluruh stake holder terkait sangat diperlukan dalam memecahkan masalah pengentasan kemiskinan. Dan harapannya Dinas Sosial ada digarda terdepan dalam upaya upaya tersebut, bukan berate sebagai penanggungjawab utama tetapi lebih kepada perumusan strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan karakter kemiskinan wilayah.

4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

5. Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang menjadai tanggung jawab instansi Sosial di daerah menurut Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang SPM bidang Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diantaranya :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial.
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ketersediaan anggaran Perangkat daerah telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap SPM tersebut.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Pada tahun anggaran 2025 Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Sosial sebanyak 7 Program dengan 19 kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kegiatan yang bersifat

pendampingan da nada juga yang terfokus ke satuKecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Ketrampilan.

3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 44.077.027.484,-

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2025 dan Perkiraan maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara :

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
				40.454.496.674	APBD (Dana Bagi Hasil)			42.678.827.484
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82 Nilai	17.317.196.674	APBD (Dana Bagi Hasil)		84 Nilai	19.849.827.484
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP		82 Nilai	1.000.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		84 Nilai	900.000.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	50.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Data	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Data	250.000.000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Berita Acara	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Berita Acara	50.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Dokumen	450.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	6 Dokumen	300.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Laporan	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	50.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	8 Laporan	200.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		22 Laporan	11.708.906.176	APBD (Dana Bagi Hasil)		22 Laporan	12.082.027.460
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1106 Orang/Bulan	11.293.906.176	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	1106 Orang/Bulan	11.482.027.460
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Laporan	250.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	140.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	325.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	25.000.000

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		4 Laporan	205.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		4 Laporan	189.460.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	25.000.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Laporan	50.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	4 Laporan	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	4 Laporan	89.460.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	1 Laporan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	1 Laporan	100.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial		2 Dokumen	40.000.000			2 Dokumen	520.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	170 Paket	0	APBD (Dana Bagi Hasil)		170 Paket	280.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	40.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	2 Dokumen	40.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	0	APBD (Dana Bagi Hasil)		15 Orang	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial		8 Layanan	394.341.800			8 Layanan	1.507.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Paket	5.110.200	APBD (Dana Bagi Hasil)		5 Paket	60.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Paket	59.247.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		20 Paket	97.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Jenis	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		10 Paket	250.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	19.986.600	APBD (Dana Bagi Hasil)		4 Paket	100.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	29.998.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Paket	150.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Laporan	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	300 Laporan	300.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 Dokumen	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		300 Dokumen	250.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	20.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	300.000.000

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen	42.950.000			100 Persen	700.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Paket	0	APBD (Dana Bagi Hasil)		5 Paket	200.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	10 Unit	42.950.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		20 Unit	500.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	767.586.698			12 Bulan	1.406.340.024
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	2.299.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		3 Laporan	8.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	193.239.174	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	316.485.288
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	572.048.524	APBD (Dana Bagi Hasil)		12 Laporan	1.081.854.736
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial		100 Persen	3.158.412.000			100 Persen	2.545.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	33 Unit	90.180.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		33 Unit	470.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Unit	34.010.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		29 Unit	300.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Unit	34.222.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		75 Unit	75.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Unit	3.000.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Unit	1.500.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	41 Unit	0	APBD (Dana Bagi Hasil)		41 Unit	200.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial		92 Persen	6.170.000.000			94 Persen	8.014.000.000
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan		50 Orang	75.000.000			50 Orang	75.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	75.000.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan		100 Persen	6.095.000.000			100 Persen	7.939.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	400.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	KP_Stunting	20 Orang	400.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	400.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		20 Orang	750.000.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240 Lembaga	5.245.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		240 Lembaga	6.739.000.000
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Sertifikat	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		5 Sertifikat	50.000.000
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan		100 Persen	50.000.000			100 Persen	50.000.000
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani		100 Persen	50.000.000			100 Persen	50.000.000
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	50.000.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti (Indikator SPM)		100 Persen	5.508.500.000			100 Persen	4.965.000.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti		1250 Orang	4.818.500.000			1250 Orang	4.275.000.000
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	820 Orang	3.508.500.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN KP_Stunting; Penanggulangan Kemiskinan	700 Orang	3.000.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	200 Orang	150.000.000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	525.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	50 Orang	400.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	50 Orang	150.000.000

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	310.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Infra Pendidikan	100 Orang	400.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	50 Orang	75.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	100 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	100 Orang	100.000.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti		695 Orang	690.000.000			695 Orang	690.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	75 Orang	75.000.000
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	200 Orang	200.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	80.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	200 Orang	80.000.000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	60.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	20 Orang	60.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	100 Orang	100.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	100 Orang	100.000.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	2 Dokumen	75.000.000

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100 Persen 97,83 Persen	7.033.800.000			100 Persen 99,00 Persen	6.500.000.000
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar		25 Orang	1.000.000.000			40 Orang	1.000.000.000
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	1.000.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; PD3 = Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat ; PN8 = Reformasi Perlindungan Sosial	40 Orang	1.000.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		100 Persen	6.033.800.000			100 Persen	5.500.000.000
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175209 Orang	380.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	PD3 = Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat ; PN8 = Reformasi Perlindungan Sosial	175209 Orang	380.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65403 Keluarga	500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	PD3 = Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat ; PN8 = Reformasi Perlindungan Sosial	65403 Keluarga	370.000.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Keluarga	4.903.800.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; KP_Stunting	1500 Keluarga	4.500.000.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ;	75 Orang	250.000.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		100 Persen	2.475.000.000			100 Persen	2.550.000.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani		100 Persen	1.250.000.000			100 Persen	1.400.000.000

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	600.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;	1500 Orang	600.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	300.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;	1500 Orang	500.000.000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penerima Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan dalam masa tanggap darurat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal Infra_KMK	100 Orang	200.000.000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pasca masa tanggap darurat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	50 Orang	100.000.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana		12 Desa	1.225.000.000			12 Desa	1.150.000.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	12 Desa	750.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Infra_KMK	12 Desa	750.000.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	25 Orang	475.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Infra_KMK	25 Orang	400.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola		100 Persen	1.900.000.000			100 Persen	750.000.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		100 Persen	1.900.000.000			100 Persen	750.000.000
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	1.500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Infra_KMK	2 Dokumen	500.000.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Makam	400.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Infra_KMK	2 Makam	250.000.000
TOTAL				40.454.496.674				42.678.827.484

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Optimalisasi Kegiatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
3. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

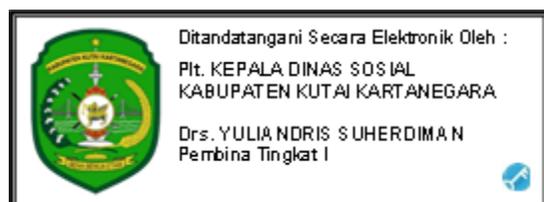
c. Rencana tindak lanjut ;

1. Peningkatan Kualitas Sumber daya aparatur penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
2. Optimalisasi Pemutakhiran DTKS.
3. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
4. Sinergitas antar stakeholders.

Rencana Kerja (RENJA) PD berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Akhirnya semoga Dokumen Renja PD tahun 2025 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Tenggarong, 14 Agustus 2024





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512
T E N G G A R O N G

Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>

KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : P- 1215/DINSOS/SET.II/050/08/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Dinas Sosial Rencana tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026 Halaman | I-8 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Dalam Negeri

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7);
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

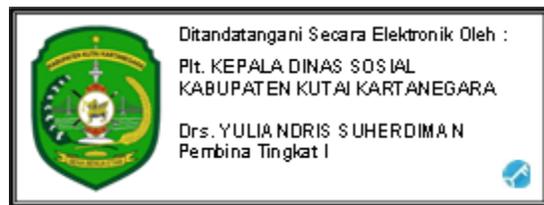
KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan acuan dan rencana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai pada tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 15 Agustus 2024





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512
T E N G G A R O N G

Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>

KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : P- 1150/DINSOS/SET.II/050/07/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024
DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah

22. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

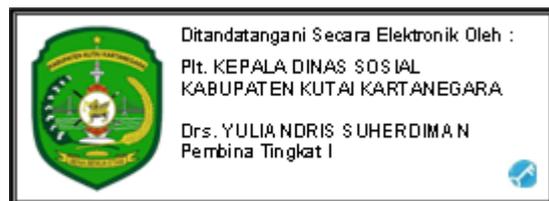
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;

d. merumuskan kebijakan

- d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tepat waktu;
- g. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 29 Juli 2024



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P- 1150/DINSOS/SET.II/050/07/2024
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DINAS
SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pengarah / Penanggung Jawab : Plt. Kepala Dinas

Ketua : Sekretaris

Sekretaris : Perencana

Anggota :
1. Seluruh Pejabat Administrator
2. Seluruh Pejabat Pengawas
3. Seluruh Pejabat Fungsional Tertentu